

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Gafar Karim, 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Pedoman Pengawasan Pemilu 2009, Bondan Gunawan, 2000, *Apa Itu Demokrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., MH., Rahman Yasin, M.I.K, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, LP2AB, Jakarta Timur,

Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie, 2003, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, RajaGrafindo, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokratiskan PEMILU*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Moeh Nurhasin, dkk. 2005. *Konflik Antar Elit. Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta,

Mohammad Najib (Ed), 2006, "*Problem Legal dan Politik Pilkada*", Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY,

Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, UII Pers Yogyakarta.

S. Toto Pandoyo, 1992, *Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta,

Sartono Sahlan, Awaludin Marwan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar*, Thafa Media, Jakarta,

## **Internet**

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3596/KPU-204-Daerah-Gelar-Pemilukada-Serentak-2015>

Pemerintah Daerah, [pemerintah.net/pemerintah-daerah/](http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/)

## **Jurnal Hukum**

Puja Pramana Kusuma Adi, 2008, Jurnal Konstitusi, *Telaah Permulaan Ajaran-Ajaran Sudarisman Puwokusumo Mengenai Konstitusi dan Maksud Membentuk Negara*, PKHK-FH Universitas Janabadra Yogyakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. I, No. 1, Oktober. Hlm: 22-23.

## **Paper**

Arief Budiman, 2015, “*Menata Instrumen Hukum Pilkada*” (Dalam acara Seminar Nasional “Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu dan Pilkada Serentak yang Berkualitas dan Akuntabel”, yang digelar oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota

## **Skripsi**

Abdul Safri Tuakia, 2014, *“Peranan KPU Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Secara Langsung Tahun 2012”* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).